

Radikalisme Keagamaan: Peningkatan Kemitraan Polri dan Masyarakat*

Azyumardi Azra**



Abstrak :

Peningkatan radikalisme keagamaan banyak berakar pada kenyataan kian merebaknya berbagai penafsiran, pemahaman, aliran, denominasi, bahkan sekte di dalam (intra) satu agama tertentu. Di kalangan Islam, radikalisme keagamaan dengan ideologi kebencian itu banyak bersumber dari pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong dan ad hoc terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman seperti itu hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi dan kompromi dengan kelompok-kelompok Muslim lain yang umumnya moderat—dan karena itu menjadi arus utama (mainstream) umat. Dalam banyak kasus radikalisme dan anarkisme keagamaan, aparat keamanan (Polri) sering mendapat kritik dari masyarakat seolah melakukan 'pembiaran'. Padahal Polri merupakan salah satu kunci terpokok dalam prevensi dan represi konflik dan kekerasan bernuansa agama.

Kata Kunci : Radikalisme, Ideologi, Kemitraan, Polisi, Masyarakat

Radikalisme, anarkisme atau kekerasan bernuansa agama cenderung terus meningkat atau setidaknya timbul tenggelam dalam beberapa tahun belakangan ini. Radikalisme keagamaan yang memunculkan konflik dan kekerasan sosial bernuansa agama merebak tidak hanya antar agama—seperti Islam versus Kristen—tetapi juga intra agama—seperti intra Islam atau intra Kristen.

Dalam skala mencemaskan, kelompok-kelompok dan sel-sel yang menampilkan radikalisme keagamaan melakukan kegiatan

terorisme dengan meledakkan bom bunuh diri di masjid al-Zikra Mapolresta Cirebon (kasus Muhammad Syarif, 14/4/2011); atau meletakkan bom di lokasi strategis seperti saluran pipa gas (kasus Pepi Fernando 21/4/2011). Pada saat yang sama juga merebak kasus-kasus menghilangnya 12 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang telah terekrut ke dalam jaringan Negara Islam Indonesia (NII)

Perkembangan terakhir ini mengindikasikan, bahwa walau Polri—dalam hal ini Densus 88—telah berhasil melumpuhkan sebagian besar jaringan kelompok radikal al-Jama'ah al-Islamiyah (JI) yang melakukan berbagai aksi pemboman—termasuk bom bunuh diri—khususnya sejak Bom Bali I, Oktober 2002, jelas kelompok dan sel radikal tetap bertahan. Bahkan

* Tulisan ini pernah disampaikan pada Lokakarya "Kemitraan Polri dan Masyarakat dalam Menangani Radikalisme" di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK, tanggal 23 Juni 2011

** Prof. Azyumardi Azra, MA, MPhil dan PhD; Gurubesar sejarah; dan Direktur Sekolah PascaSarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

terlihat bermetamorfosis ke dalam sel-sel baru yang cenderung bergerak sendiri-sendiri dan independen—meski dalam satu dan lain hal masih berkaitan satu sama lain.

Menghadapi gejala seperti ini, kalangan figur publik dan masyarakat menganggap terus terjadinya peningkatan intoleransi dan radikalisme di lingkungan intra dan antar agama bahkan dengan negara. Dan, intoleransi, radikalisme dan terorisme bersumber dari ideologi, yang sederhananya dapat kita sebut sebagai ideologi kebencian (*ideology of hatred*) melalui manipulasi dan penyimpangan pemahaman keagamaan. Gejala ini jelas dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi negara-bangsa Indonesia yang berdasarkan pada empat pilar: UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Akar Radikalisme Keagamaan

Peningkatan radikalisme keagamaan banyak berakar pada kenyataan kian merebaknya berbagai penafsiran, pemahaman, aliran, denominasi, bahkan sekte di dalam (intra) satu agama tertentu. Para penganut radikalisme intra-agama—yang merupakan minoritas sangat kecil—ini dengan segera dapat menjadikan umat dan pemimpin dari lingkungan agamanya sendiri yang merupakan kaum mayoritas sebagai sesat dan bahkan *thagbut*. Dan pada saat yang sama juga dapat juga menjadikan umat dari agama-agama lain menjadi sasaran radikalisme mereka.

Di kalangan Islam, radikalisme keagamaan dengan ideologi kebencian itu banyak bersumber dari pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong dan *ad hoc* terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman seperti itu hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi dan kompromi dengan kelompok-kelompok Muslim lain yang umumnya moderat—dan karena itu menjadi arus utama (*mainstream*) umat. Kelompok umat Islam yang berpaham

seperti ini sudah muncul sejak masa al-Khulafa' al-Rasyidun keempat Ali ibn Abi Thalib dalam bentuk kaum Khawarij yang sangat radikal dan melakukan banyak pembunuhan terhadap pemimpin Muslim yang telah mereka nyatakan 'kafir'.

Radikalisme keagamaan di dalam Islam juga dapat bersumber dari bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi, khususnya pada spektrum sangat radikal seperti Wahabiyah yang muncul di Semenanjung Arabia pada akhir abad 18-awal abad 19 dan terus merebak sampai sekarang ini. Tema pokok kelompok dan sel Salafi ini adalah pemurnian Islam—membersihkan Islam dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai 'bid'ah', yang tidak jarang mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan.

Dengan pemahaman dan praksis keagamaan seperti itu, kelompok dan sel radikal ini 'menyempal' (*splinter*) dari *mainstream* Islam yang memegang dominasi dan hegemoni otoritas teologis dan hukum agama dan sekaligus kepemimpinan agama. Karena itu, respon dan reaksi keras sering muncul dari kelompok-kelompok 'mainstream', arus utama, dalam agama. Mereka tidak jarang mengeluarkan ketetapan, bahkan fatwa, yang menetapkan kelompok-kelompok sempalan tersebut sebagai sesat dan menyesatkan. Ketetapan atau fatwa tersebut dalam prakteknya tidak jarang pula digunakan kelompok-kelompok *mainstream* tertentu sebagai dasar dan justifikasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

Radikalisme keagamaan juga dapat mendapat tambahan alasan dari deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial-budaya, dan akses globalisasi, dan semacamnya sekaligus

merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok sempalan tersebut tidak jarang mengambil bentuk kultus (*cult*), yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang yang dipandang kharismatik. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat; sekarang waktunya bertobat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Doktrin dan pandangan teologis-eskatologis seperti ini, tidak bisa lain dengan segera dapat menimbulkan reaksi dari agama-agama *mainstream*, yang dapat berujung pada konflik sosial.

Masih berlanjutnya konflik sosial benuansa intra- dan antar-agama dalam masa Reformasi ini, sekali lagi, disebabkan berbagai faktor amat kompleks. Pertama-tama, berkaitan dengan euforia kebebasan, di mana setiap orang atau kelompok merasa dapat mengekspresikan kebebasan dan kemauannya, tanpa peduli dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian terdapat gejala menurunnya toleransi. Kedua, masih berlanjutnya fragmentasi politik dan sosial di khususnya di kalangan elit politik, sosial, militer, yang terus mengimbas ke lapisan bawah (*grassroot*) dan menimbulkan konflik horizontal yang laten dan luas. Terdapat berbagai indikasi, konflik dan kekerasan benuansa agama bahkan diprovokasi kalangan elit tertentu untuk kepentingan mereka sendiri.

Penyebab ketiga yang juga sangat penting adalah tidak konsistennya penegakan hukum. Beberapa kasus konflik dan kekerasan yang benuasa agama atau membawa simbolisme agama menunjukkan indikasi konflik di antara aparat keamanan, dan bahkan kontestasi di antara kelompok-kelompok elit lokal. Keempat, meluasnya disorientasi dan dislokasi dalam masyarakat Indonesia, karena kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga kebutuhan kebutuhan sehari-hari lainnya

membuat kalangan masyarakat semakin terhimpit dan terjepit. Akibatnya, orang-orang atau kelompok yang terhempas dan terkapar ini dengan mudah dan murah dapat melakukan tindakan emosional, dan bahkan dapat disewa untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan kekerasan.

Radikalisme keagamaan jelas berujung pada peningkatan konflik sosial dan kekerasan benuansa intra- dan antar-agama; juga bahkan antar umat beragama dengan negara. Ini terlihat jelas, misalnya, dengan meningkatnya aktivitas penutupan gereja di beberapa tempat di mana kaum Muslim mayoritas, seperti di Bekasi, Bogor dan Temanggung belum lama ini. Atau penutupan masjid/mushala di daerah mayoritas non-Muslim di berbagai tempat di tanahair, seperti di Bali pasca-bom Bali Oktober 2002; termasuk pula anarkisme terhadap berbagai fasilitas dan masjid-masjid Ahmadiyah serta para jemaatnya. Berbagai tindak kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah juga masih terus terjadi di sejumlah tempat mulai dari NTB, Parung, Cikeusik dan berbagai lokasi lain.

Lalu ada juga kelompok-kelompok *hardliners* di kalangan Muslim, menegakkan hukumnya sendiri—atas nama syari'ah (hukum Islam)—seperti pernah dilakukan Lasykar Jihad di Ambon ketika terjadinya konflik komunal Kristen-Muslim; atau razia-razia yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dalam beberapa tahun terakhir ini—khususnya pada Ramadhan—atas diskotik, dan tempat-tempat hiburan lainnya atas nama *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (menyeru dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Bagi mereka tidak cukup hanya *amar ma'ruf* dengan lisan, perkataan; harus dilakukan pencegahan terhadap kemungkaran dengan tangan (*al-yad*), atau kekuatan. Sekali lagi, tindakan-tindakan seperti ini juga dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Umat Islam *mainstream*—seperti diwakili NU, Muhammadiyah, dan banyak organisasi lain—berulang kali menyatakan, mereka menolak cara-cara kekerasan, meski untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran sekalipun. Tetapi, seruan organisasi-organisasi *mainstream* ini sering tidak efektif; apalagi di dalam organisasi-organisasi ini juga terdapat kelompok garis keras yang terus juga melakukan tekanan internal terhadap kepemimpinan organisasi masing-masing.

Peran Polri dan Pejabat Pemerintah

Dalam banyak kasus radikalisme dan anarkisme keagamaan, aparat keamanan sering mendapat kritik dari masyarakat seolah melakukan ‘pembiaran’. Memang Densus 88 berhasil melumpuhkan sebagian besar sel II; tetapi pada saat yang sama seakan-akan membiarkan terus tumbuhnya sel-sel NII yang kalangan masyarakat curiga bahwa sel-sel tersebut mendapat *backing* atau dipelihara oknum intel atau aparat tertentu.

Akibatnya, Polri seakan-akan tidak mampu menegakkan tugas negara melindungi warganegara. Petinggi Polri cenderung selalu beralasan, mereka tidak bisa bertindak keras menghadapi massa yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan ‘anggota’. Jadi, daripada para anggota Polri di lapangan menjadi sasaran amuk massa pula, lebih baik menempuh langkah aman ‘membiarkan’ massa mengamuk semau mereka.

Bahkan sering juga terlihat, Polri pada dasarnya khawatir pada munculnya *backlash*, reaksi balik yang keras, dari kelompok dan ormas *mainstream* yang menentang penghentian kekerasan secara keras oleh aparat kepolisian. Dan, kelompok dan sel radikal dan teroristik ini sangat lihai untuk bisa memunculkan *backlash* itu dengan menggunakan istilah-istilah yang menyangkut umat Islam secara keseluruhan

misalnya menyebut Polri menangkap ‘aktivis Islam’ atau ‘ulama’, yang jelas-jelas tidak ada hubungan dengan Islam yang benar dan ulama yang sesungguhnya.

Padahal Polri merupakan salah satu kunci terpokok dalam prevensi dan represi konflik dan kekerasan bernuansa agama. Jika Polri—dengan berbagai alasan tertentu—tetap tidak mau dan tidak mampu menindak para aktor intelektual dan pelaku radikalisme keagamaan, jelas kekerasan atas nama agama tetap berlangsung dari waktu ke waktu. Dalam keadaan ini, Indonesia dapat mengalami semacam ‘Pakistanisasi’ yang boleh jadi mengantarkan Indonesia menjadi negara gagal (*failed state*), yaitu negara yang gagal menegakkan hukum dan ketertiban; dan melindungi setiap warganegara dan kelompok masyarakat dari kekerasan.

Polri bersama penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Peradilan pada saat yang sama mestilah memulihkan kredibilitas dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Jika para aktor intelektual dan pelaku kekerasan atas nama agama tetap dibiarkan bebas, atau hanya dijatuhi hukuman ‘sangat ringan’ atau diselesaikan ‘secara adat’, bisa dipastikan ini semua hanya ‘memberi angin’ kepada orang-orang dan kelompok anarkis, bahwa mereka pada dasarnya memiliki ‘impunitas’—tidak bisa dihukum.

Tak kurang pentingnya, para pejabat publik, seperti Menteri Kabinet misalnya, sepatutnya tidak memberikan ‘pesan keliru’ kepada masyarakat yang bernada *condoning violence*—‘merestui’ kekerasan. Di antara contoh *wrong messages* itu adalah: menerima figur ormas yang diketahui publik gemar melakukan kekerasan; atau melakukan *victimizing the victims*—menyalahkan mereka yang sudah menjadi korban kekerasan.

Padahal, para pejabat publik ini seharusnya menampilkan diri sebagai pelindung setiap dan

seluruh warganegara, terlepas dari apapun agama dan keyakinannya. Jika para pejabat pemerintah sudah bersikap partisan, menyalahkan korban kekerasan, dan 'menyerah' kepada tekanan kelompok tertentu dalam masyarakat, tidak bisa lain berarti secara tersirat membenarkan tindakan kekerasan atas nama agama.

Kemitraan Polri dan Masyarakat

Mengingat faktor-faktor penyebab radikalisme keagamaan yang sangat kompleks dan rumit seperti itu, patut diingatkan kepada setiap orang, kelompok dan bahkan aparat Polri untuk tidak tergesa-gesa dan simplistik mengambil kesimpulan, menjadi semacam *sweeping generalization*. Jika ada orang dan atau kelompok melakukan kekerasan atas nama agama, mereka jelas bukan representasi dari agama atau umat beragama secara keseluruhan.

Karena itu, setiap pihak sepatutnya menghindari diri daripada terjerumus ke dalam penciptaan stigmatisasi terhadap orang dan kelompok yang kebetulan dari agama tertentu. Karena, stigmatisasi itu selain hanya dapat meningkatkan mispersepsi terhadap agama tertentu dan penganutnya, sekaligus juga mempertinggi potensi konflik, pertikaian yang bisa meletup sewaktu-waktu menjadi kekerasan.

Dengan masih bertahannya radikalisme keagamaan dan juga konflik dan kekerasan sosial-keagamaan, semangat dialog intra dan antar agama perlu ditingkatkan di kalangan para pemimpin agama. Dialog intra dan antar agama hendaknya tidak dilaksanakan secara *ad hoc* dan sporadis untuk meresponi situasi atau kasus tertentu saja; tetapi sebaliknya secara reguler dan terencana. Dengan begitu, penyelesaian konflik dan pertikaian yang melibatkan umat beragama dapat dilaksanakan secara lebih tuntas dengan membahas lebih menyeluruh akar dan aktualisasi konflik yang ada.

Dalam konteks itu, perlu peningkatan peran

lembagayangsemestinya memainkan peranan kunci seperti Kementerian Agama lewat dialog intra dan antar agama. Kementerian Agama mesti menggalang fokus, orientasi, dan momentum untuk mendorong kehidupan keagamaan lebih toleran, harmonis dan hidup berdampingan secara damai. Karena itu, Kementerian Agama perlu menegaskan kembali visi dan misi lebih jelas dan *implementable* tentang penciptaan kehidupan beragama lebih kondusif bagi kehidupan bangsa. Kementerian Agama seyogyanya tidak berharap radikalisme keagamaan atau konflik, pertikaian dan kekerasan di antara umat beragama dapat terselesaikan pihak-pihak terlibat saja atau bakal hilang dalam perjalanan waktu.

Upaya penyelesaian konflik sosial bernuansa keagamaan melalui kebijakan seperti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang 'Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat' (2008), misalnya, tidak/belum berhasil meredam konflik sosial bernuansa intra-agama. Masih terdapat *hardliners* di kalangan *mainstream* yang menganggap SKB itu sebagai 'belum memadai'; mereka bahkan menghendaki adanya Keputusan Presiden untuk melarang dan membubarkan JAI. Dari waktu ke waktu pihak *hardliners* masih melakukan tekanan kepada pemerintah dan sekaligus mengintimidasi JAI, yang sering berujung kekerasan. Karena itu, berbagai instansi pemerintah patut meningkatkan kerjasama dengan Polri dalam memberantas berbagai bentuk kekerasan atas nama agama secara lebih komprehensif.

Pada saat yang sama Polri patut meningkatkan kemitraannya dengan berbagai kalangan masyarakat dalam menghadapi kekerasan atas nama agama tersebut. Semua pihak sudah maklum belaka, radikalisme dan terorisme tidak bisa hanya dihadapi Polri; tetapi mesti melibatkan masyarakat pada berbagai

levelnya. Karena itu, melawan radikalisme dan terorisme dapat dikatakan merupakan semacam 'perang semesta', yang melibatkan berbagai pihak, khususnya masyarakat yang di antaranya tergabung ke dalam ormas-ormas keagamaan sejak dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal.

Sebab itu, Polri sepatutnya meningkatkan pelibatan masyarakat yang diwakili kepemimpinan ormas dan kepemimpinan sosial seperti pemuda dan remaja dalam menghadapi radikalisme dan terorisme atas nama agama. Ini dapat dilakukan dengan konsultasi, tukar menukar pandangan di antara pihak Polri dengan kalangan kepemimpinan masyarakat yang berlapis-lapis itu. Selanjutnya, kemitraan itu dapat menjangkau tingkat lebih intens lagi melalui kerjasama program dalam berbagai bentuknya.

Melalui kemitraan dan kerjasama dapat dilakukan penanganan radikalisme dan terorisme sejak dini, mulai dari pencegahan, penanganan sampai penanggulangan. Hal ini misalnya bisa dilakukan melalui kerjasama program penyuluhan keagamaan terhadap orang dan kelompok masyarakat yang rentan pengaruh dan rekrutmen sel-sel radikal dan teroristik. Pada tahap selanjutnya, melalui kemitraan dapat dikembangkan berbagai bentuk program deradikalisasi bagi mereka yang terlibat dalam jaringan sel-sel radikalistik dan teroristik, baik yang masih dalam tahanan Polri atau dalam Lembaga Pemasyarakatan setelah masing-masing dijatuhi hukuman tetap.

Kemitraan Polri dan masyarakat dapat pula ditingkatkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, khususnya yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Hal ini mengingat, sel-sel terorisme sangat giat pula berusaha merekrut mahasiswa, pelajar dan remaja melalui penyusupan dan infiltrasi ke lembaga-lembaga pendidikan. Polri dapat meningkatkan kerjasama

dan kordinasi dengan pihak Yayasan dan/atau pengelola lembaga pendidikan bersangkutan.

Dan tidak kurang pentingnya pula, Polri dapat pula meningkatkan kemitraannya dengan lingkungan keluarga. Aparat Polri pada tingkat RT/RW bersama tokoh dan pimpinan masyarakat setempat secara insidental dapat mengadakan pertemuan dengan kalangan keluarga di lingkungan tertentu. Melalui pertemuan seperti ini, keluarga dapat diberikan perspektif mengenai usaha dini untuk mencegah terjerumusnya anggota keluarga ke dalam radikalisme dan terorisme.

Dalam peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak masyarakat itu, Polri dapat menggunakan 'bahasa' yang sesuai, semacam 'bahasa agama', atau 'bahasa psikologi' dan bahkan 'bahasa pendidikan'. Di lingkungan Polri sendiri terdapat mereka yang mampu berbicara dalam 'bahasa-bahasa' seperti itu, sehingga komunikasi publik antara Polri dan masyarakat dapat berjalan baik dan lancar; dan mereka mestilah difungsikan lebih maksimal lagi untuk memperkuat kemitraan yang kian *workable* di antara Polri dengan masyarakat.

Senarai Bacaan

Azra, Azyumardi et.al., 2008, *Sistem Siaga Dini Untuk Kerusuhan Sosial*, Jakarta: PPIM dan Balitbang Dep. Agama RI

Azra, Azyumardi, 2002a, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Azra, Azyumardi, 2002b, *Konflik Baru Antar-Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Azra, Azyumardi, "Pengantar", 2000, *Merajut Damai di Maluku: Telaah Konflik Antarumat 1999-2000*, Jakarta: MUI dan

Yayasan Pustaka Umat.

Azra, Azyumardi, 1999, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina.

Bamualim, Chaider et al, 2001, *Laporan Penelitian Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Effendy, Bahtiar & Soetrisno Hadi (eds), 2007, *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Nuqtah.

Fananie, Zainuddin, Atika Sabardila & Dwi Purnanto, 2002, *Radikalisme Agama & Perubahan Sosial*, Surakarta: Muhammadiyah University Press & The Asia Foundation.

Haedar Nashir, 2007, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP

Makruf, Jamhari & Jajang Jahroni (eds), 2004, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zada, Khamami, 2002, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju.